BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk pembiayaan Ijarah Multi Jasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta dikeluarkan pada tahun 2007. Hal tersebut berselang tiga tahun dari keluarnya fatwa DSN MUI No.44/VIII/DSN-MUI/2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa. Dalam operasionalnya produk pembiayaan Ijarah Multi Jasa berpedoman pada fatwa DSN MUI. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa merupakan pembiayaan konsumtif yang menjadi solusi bagi pembiayaan dalam bidang manfaat jasa yang tidak bisa diakomodir oleh pembiayaan *murabahah* maupun *ijarah*.
2. Pada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta objek pada Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tidak jelas. Apakah kebutuhan jasa dari manfaat barang (*ijaratul 'ayan*) atau kebutuhan manfaat dari pekerjaan (*ijaratul'amal*). Sehingga objek dalam pembiayaan Ijarah Multi Jasa tidak tepat. Sedangkan perhitungan upah (*ujrah*) dalam pembiayaan Ijarah Multi Jasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta menggunakan prosentase dan bersifat tetap. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dari Fatwa yang harus menggunakan nominal. Ketepatan penggunaan akad dalam Pembiayaan Ijarah Multi Jasa di PT BPR Syariah Bangun Derajat Warga Yogyakarta juga bermasalah. Dalam fatwa DSN MUI disebutkan bahwa akad yang digunakan dalam

pembiayaan multi jasa adalah akad *ijarah* dan *kafalah*. Sedangkan dalam praktek di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta ada akad *wakalah* dalam salah satu praktek realisasi Pembiayaan Ijarah Multi Jasa. Sehingga akad *wakalah* tersebut tidak sesuai fatwa DSN MUI.

B. Saran

Dari uraian tentang Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Para akademisi hendaknya perlu untuk mengkaji tentang Pembiayaan Ijarah Multi Jasa lebih lanjut sehingga praktek pembiayaan ini dapat sesuai dengan fatwa DSN MUI.
2. Untuk PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta hendaklah berhati-hati dalam implementasi fatwa DSN MUI dalam setiap produk-produknya. Seperti pada pembiayaan Ijarah Multi Jasa, BPR Syariah harus menggunakan akad yang tepat dan perhitungan *ujrah* yang sesuai fatwa
3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia hendaklah menghimbau kepada Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan implementasi fatwa terhadap produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga meminimalisir adanya ketidak sesuaian antara fatwa dengan praktek di Lembaga Keuangan Syariah.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dan kekhilafan menyadarkan penulis akan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi kemampuan yang penulis miliki. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki penelitian yang akan datang.

Dengan ini penulis berharap, agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Amin.